

# **PENGARUH JUMLAH USAHA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL DI KOTA PAREPARE TAHUN 2014**

**HERMAN**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Jurusan Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Parepare

***HERMAN, 2019, with the research title "Analysis of Regional Financial Capability in the Implementation of Regional Autonomy in the City of Parepare" Advisor I Mr. Abdul Hamid and Advisor II Ms. Ira Sahara. Thesis Regional Financial Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah Parepare University. This study aims to determine the regional financial capacity towards the implementation of regional autonomy in the Municipality of Parepare. This study uses data collection techniques, namely observation, documentation and interviews. The data analysis technique in this study uses the Regional Financial Independence Ratio Analysis. The results of the study show that the independence ratio of the Municipality of Parepare in 2013 to 2017 which obtained an average yield of 17.26%. or being in the pattern of instructive relations, namely the role of the central government is still very dominant compared to this local government can be seen from the Regional Financial Independence Ratio still classified in the interval 0% - 25%. The independence ratio which is still low illustrates the regional financial capacity of the Municipality of Parepare in financing the implementation of government and regional development is still very dependent on assistance from the central government.***

***Keywords: Regional Finance and Regional Autonomy***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi daerah yang sudah berjalan 9 tahun ini telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kedua perundang-undangan di atas telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah tersebut akan dapat terlaksana secara optimal bila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. Pendapan Asli daerah (PAD) selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab (Azwin Rizkiano, 2011: 17).

Dikutip dari **AKARBERITA**, ada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintahan Kota Parepare pada tahun 2017 lalu gagal merealisasikan target Pendapan asli Daerah (PAD). Ketua Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Nasarong mengatakan keempat SKPD tersebut diantaranya RSUD Andi

---

Makkasau, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan serta Dinas Komunikasi dan Informasi. Bahkan Dinas Perdagangan tercatat sebagai SKPD yang realisasi PAD tahun 2017 di bawah 50% dari target, hanya mampu mencapai Rp 1,3 miliar dari target Rp2,8 miliar. Selanjutnya, rincian realisasi PAD 4 SKPD dianggarkan gagal capai target diantaranya, realisasi Dinas Kesehatan Rp 10,05 miliar dari target Rp 10,77 miliar, Diskominfo dari target Rp132,5 juta hanya mampu mencapai Rp 120,5 juta, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau dari target Rp 90,12 miliar hanya mampu merealisasi Rp 81,38 miliar” untuk SKPD lainnya, berhasil mencapai target PAD, bahkan over target.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan masalah pokok peneliti ini adalah” Bagaimana kemampuan keuangan daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah Kota Parepare ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kota Parepare.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif . Penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

#### **Tempat dan Waktu**

Tempat penelitian adalah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai maret 2019.

#### **Prosedur Peneliti**

1. Mengajukan Permohonan Penelitian: Peneliti memasukkan surat permohonan penelitian yang sudah disetujui dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melakukan penelitian pada objek atau instansi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi.
2. Disposisi Pimpinan Instansi: Untuk selanjutnya setelah pemasukan surat permohonan penelitian, Bidang Umum dan Kerjasama akan menindaklanjuti pembuatan surat perintah yang menjelaskan tentang izin penelitian pada instansi tersebut dengan persetujuan dari pimpinan instansi.
3. Pengumpulan Data: Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data pendukung penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, dalam hal ini pengumpulan data mengenai kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah
4. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan: Tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah dikumpulkan lalu melakukan pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian, selanjutnya menentukan hasil penelitian.

5. Menarik Kesimpulan: Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

### **Jenis Data**

- a. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka (Numeric) dan dapat dihitung yaitu data . Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah serta kesiapan pemerintah daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Data kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang persial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

### **Sumber Data**

- a. *Person*, yaitu sumber data yang diperoleh dari individu yang berkompeten memberikan informasi yang diperlukan.
- b. *Paper*, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumentasi, catatan atau surat yang dapat menjadi data dalam penelitian.
- c. *Place*, yaitu tempat dimana data-data itu diperoleh dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah di Kota Parepare.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung tempat penelitian terhadap objek penelitian dengan melakukan kunjungan langsung.
2. Wawancara, yaitu teknik untuk mendapatkan awal permasalahan dan variabel apa yang harus diteliti. Penulis perlu melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Pendaptan Daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiaya kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diliat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut halim dalam Debora Debby(2014) "PAD merupakan semua panerimaan daerah yang berasal dari sumber

---

ekonomi asli daerah".PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Sehubungan dengan hal di atas setiap di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut halim mampu dalam Debora Debby (2014) rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 3.2 Analisis Data**

Polah hubungan kemandirian keuangan daerah

Kemampuan keuangan	Rasio Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25 %	Instruktif
Rendah	>25-50%	Konsultatif
Sedang	>50-75%	Partisipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Parepare, khususnya bagian akuntansi dalam memperoleh data Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah , Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi, dan Pinjaman Daerah Kota Parepare selama tahun 2013-2017, maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5.1

Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2017 Kota Parepare

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2013	Rp 72.462.216.859,79
2014	Rp 112.070.946.227,51
2015	Rp 115.369.532.648,35
2016	Rp 136.313.232.054,73
2017	Rp 140.621.664.388,48

Sumber data : Data diolah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya.

## 2. Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi

Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi Kota Parepare dapat dilihat pada table berikut:

Table 5.2  
Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi Kota Parepare

Tahun	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi
2013	Rp 534.844.562.837,55
2014	Rp 591.947.511.405,19
2015	Rp 716.095.335.548,19
2016	Rp 730.121.072.911,00
2017	Rp 733.456.642.600,00

Sumber data : Data diolah

Berdasarkan urain tersebut diatas, Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi Kota Parepare dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya.

## 3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah Kota Parepare dari tahun 2013 sampai dengan 2017 tidak memiliki Pinjaman Daerah.

## 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Untuk melihat Rasio Kemandirian , dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Table 5.4  
Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Parepare Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman	Rasio Kemandirian
2013	Rp72.462.216.859,79	Rp 534.844.562.837,55	13,45 %
2014	Rp 112.070.946.227,51	Rp 591.947.511.405,19	18, 93 %
2015	Rp 115.369.532.648,35	Rp 716.095.335.548,19	16,11 %
2016	Rp 136.313.232.054,73	Rp 730.121.072.911,00	18, 66 %

2017	Rp 140.621.664.388,48	Rp 733.456.642.600,00	19, 17 %
Rata-rata			17, 26 %

Berdasarkan pada table 5.4 Rasio Kemandirian Kota Parepare tahun 2013-2017 diatas, memberikan gambaran bahwa pada tahun 2013 Rasio Kemandirian sebesar 13,45%. Tahun 2014 Rasio Kemandirian sebesar 18, 93%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 Rasio Kemandirian sebesar 16,11% , mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 Rasio Kemandirian sebesar 18,66%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 Rasio Kemandirian sebesar 19,17%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan urain tersebut diatas rata-rata Rasio Kemandirian Kota Parepare dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 17,26%.

Table 5. 5

Tingkat Kemampuan Keuangan, Kemandirian dan Pola Hubungan

Tahun	Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2013	13,45 %	Rendah Sekali	Instruktif
2014	18, 93 %	Rendah Sekali	Instruktif
2015	16,11 %	Rendah Sekali	Instruktif
2016	18, 66 %	Rendah Sekali	Instruktif
2017	19, 17 %	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata	17, 26 %	Rendah Sekali	Instruktif

Dari tabel di atas terlihat bahwa kemandirian daerah Kota Parepare dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah dan bahkan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 cenderung mengalami penurunan. Karena nilai rata-ratanya yang menunjukkan presentase di bawah 25%, ini berarti Kota Parepare memiliki pola hubungan yang bersifat instruktif terhadap pemerintah pusat, adapun penyebabnya dikarenakan pemerintah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi penerimaan di daerahnya .

Sumber pendapatan dari transfer pusat, provinsi dan pinjaman juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Berdasarkan uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kota Parepare memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kota Parepare dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Parepare dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2013 – 2017 dianggap masih kurang.

Rasio kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 17,26 %masih berada diantara 25% - 50% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari transfer pusat dan provinsi masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kemampuan keuangan Pemerintah Kota Parepare, penulis mencoba mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Parepare Untuk dapat memperhatikan lagi dan lebih meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerah dan juga agar pemerintah Kota Parepare biar dapat menggali potensi dan sumber daya yang ada di daerah Kota Parepare.
  2. Meningkatkan terus kinerja pengelolaan terhadap realisasi APBD, agar Kota Parepare mampu menjadi kota yang mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.
  3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.
-



**DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*. Republik Indonesia.
- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rizkiano, A.2011. *Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta..
-